

PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (Studi Kasus: Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor)

Ayu Kholilah

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi mengenai partisipasi masyarakat sebagai strategi mewujudkan good governance dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai partisipasi masyarakat sesuai fokus penelitian. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu dari pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, verifikasi lalu penyajian data. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor masih adanya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya partisipasi. Partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam 4 (empat) bentuk dari tahap pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi, faktor budaya dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor pendukung yaitu tersedianya forum diskusi dan kesempatan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Adapun hal-hal yang disarankan seperti Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan sosialisasi, saling berinteraksi dengan masyarakat dan mengadakan pengembangan kegiatan dalam bidang ekonomi.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan

ABSTRACT

This study is focused on knowing and understanding the phenomenon that occurs regarding participation of public society as a strategy to realize good governance in improving the development of educational infrastructure and what is the factors that affect the level of public society's participation. According to the research focus, this type of research is descriptive qualitative, which provides a real description of public society's participation. The data presented in this study are primary and secondary data, which were collected by means of observation, interviews and documentation studies. The data analysis technique of this research uses the Miles and Huberman technique, it is from data collection, data reduction or data processing, verification and then data presentation. The results of research and discussion, it is known that in improving the development of educational infrastructure in Cipinang Village, Rumpin District, Bogor Regency, there are still people who are not aware of the importance of participation. Community participation is carried out in 4 (four) forms from the stages of decision making, implementation of activities, monitoring and evaluation, and utilization of development results. In its implementation there are inhibiting factors, namely the lack of socialization, cultural factors and economic factors. While the supporting factors are the availability of discussion forums and opportunities provided by the Village Government to the community. As for the things that are suggested, such as the Village Government should further improve socialization, interact with the community and conduct development activities in economic.

Keywords: Participation, Infrastructure Development, Education

1. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu Negara pada hakikatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan Negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV, yakni tujuan pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu pembangunan Nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu persoalan mendasar

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat Pusat, Daerah maupun Desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya. Untuk mewujudkan misinya pemerintah harus melakukan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Good governance telah menjadi wacana yang populer di tengah masyarakat. Hampir disetiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan istilah ini tidak pernah ketinggalan. Dapat dikatakan bahwa *good governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Kemudian berfokus pada aktor-aktor pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu dari aktor tersebut, sementara itu ada aktor dari luar pemerintah seperti pihak swasta dan masyarakat sipil. Demikian juga adanya struktur formal dan struktur informal, dimana struktur formal pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pemerintah hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian sedangkan struktur informal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun individu-individu di dalam struktur formal.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *good governance* merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggaraan urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistik, *non* partisipatif serta tidak menimbulkan rasa percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. Hal ini seperti nyata dari fenomena semakin rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah ini, berujung pada posisi administrasi publik yang sulit serta tidak menguntungkan.

Lahirnya konsep *good governance* dianggap sebagai suatu paradigma baru landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. *Good governance* yang merupakan landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan saat ini pada prinsipnya menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat sipil. *Good governance* ini mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan Partisipasi Masyarakat adalah “Peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Lebih lanjut dalam Pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari 8 karakteristik dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah baik di daerah kota maupun perdesaan, karena dapat dilihat begitu besar pengaruh partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu program disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam program, agar program berjalan dengan semestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Salah satu strategi membangun dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan

pemerintahan. Demokrasi sebagai inti dari *good governance* menuntut keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mulai dari perumusan, pembuatan, dan penyusunan kebijakan sampai pada pelaksanaan dan pengendalian pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap aktivitas pemerintah merupakan pilar utama Negara demokrasi. Di dalam Negara demokrasi rakyatlah yang berdaulat, sehingga sangat tepat jika sistem pemerintahan yang mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi menjadikan partisipasi masyarakat sebagai sesuatu yang menjadi suatu keniscayaan.

Masyarakat sebagai elemen pokok dalam sistem pemerintahan Negara seharusnya diberi ruang untuk mengambil bagian dalam membangun sistem pemerintahan dan pembangunan Negara yang maju dan kuat. Masyarakat memiliki potensi yang sangat besar dalam segala aspek, karena dalam masyarakat tersimpan sumber daya yang besar. Dalam masyarakat terdapat energi atau kekuatan massa yang sangat besar, anggota masyarakat yang memiliki intelektualisme tinggi juga terdapat ahli pemikir dan implementatif pemerintahan serta pembangunan yang handal. Sehingga potensi yang sedemikian besar tersebut jika dilibatkan secara optimal dalam segala aktivitas pemerintahan bisa lebih memperkuat semangat yang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan bagi Negara.

Sebaliknya jika masyarakat tidak dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan Negara dapat mengalami stagnasi, karena mengakibatkan potensi besar yang terdapat di dalam masyarakat. Bisa terjadi segala macam aktivitas pemerintahan akan mendapat kritikan yang serius dan tindakan yang dapat menghambat jalannya pemerintah dan pembangunan. Kebijakan Negara yang kurang atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat sering mendapat tantangan besar dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang telah dibuat dengan menggunakan sumber daya yang besar, namun ketika kebijakan tersebut

hendak diimplementasikan serta mendapat respon negative dari masyarakat seperti tindakan deskruktif.

Kondisi kualitas layanan dan output pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Sumber daya manusia akan menjadi potensi tersendiri apabila dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Namun melihat kondisi pendidikan di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Maka permasalahan pendidikan di Indonesia akan menjadi tugas pemerintah dalam menata dan mengembangkan pendidikan yang ada dengan mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan demi kemajuan pendidikan di Indonesia sangat penting, karena dengan partisipasi masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Pemerintah Kabupaten Bogor mengakui penerapan sekolah aman dan nyaman di Kabupaten Bogor masih terkendala banyak masalah. Salah satunya yaitu belum optimalnya penerapan standar mengenai sekolah aman dan nyaman. Salah satu fakta di lapangan ditemukan bahwa, masih banyak sekolah yang rusak dikarenakan pembangunan sekolah menggunakan material yang tidak sesuai dengan standar, sehingga sangat mudah rusak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor ternyata jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) yang rusak parah maupun ringandan berpotensi roboh jumlahnya cukup banyak pada tahun 2017 yaitu 6.265 ruang. Dan hanya sekitar 200 ruang kelas yang dapat diselesaikan. Terdapat 188.340 murid yang selama ini terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kondisi tidak aman dan nyaman. Bahkan terancam keselamatannya dan 140.820 murid terpaksa belajar di ruang kelas sekat atau bahkan di teras rumah warga karena kekurangan kelas.

Ribuan kelas yang rusak itu hampir tersebar di seluruh Kecamatan, salah satunya berlokasi di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang terdapat 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) dimana masing-masing memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Wajah pendidikan dalam implementasi otonomi daerah juga hingga saat ini terbukti belum dapat memberikan jaminan atas terlahirnya pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Demikian pula sistem dan pengelolaan pendidikan dipastikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, beberapa bagian diantaranya adalah menyangkut dengan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai fasilitas yang memberikan percepatan pendidikan bagi pemerintah dan masyarakat. Karena itu, perlu adanya arah kebijakan penerapan sekolah yang aman dan nyaman serta sinergitas pada program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah, mitra kerja atau pihak swasta, dan pelibatan masyarakat. Pendidikan untuk semua menjadi impian semua masyarakat dan mestinya dapat terlaksana dengan adil dengan didukung berbagai fasilitas yang memadai seperti bangunan sekolah, ruang kelas yang cukup serta guru yang professional sehingga mutu pendidikan lebih berkualitas.

2. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif sebagai salah satu metode penelitian yang memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di lapangan. Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti harus terlebih dahulu melihat tingkat kesahihan data tersebut dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data.

Pendekatan ini sesuai dengan masalah penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai strategi

mewujudkan *good governance* dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan. Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat sebagai strategi mewujudkan *good governance* dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam sesuai dengan fokus dan tujuan tersebut maka penelitian dapat mencapai tujuan maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara mendalam kondisi di lapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang diamati secara menyeluruh dan mendalam oleh peneliti maka lokasi penelitian tersebut berada di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan lama waktu observasi, wawancara dan studi dokumentasi berlangsung dilakukan adalah 11 (sebelas) bulan.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah dimana pelaksanaan observasi, wawancara dan studi dokumentasi berlangsung. Wawancara kepada informan dalam penelitian ini dilakukan di tempat dan jam yang telah disepakati terlebih dahulu dengan informan. Situasi berlangsungnya proses pengamatan dan wawancara dilakukan dengan suasana tanpa tekanan. Ini dimaksudkan agar informan mendapatkan informasi dengan leluasa tanpa merasakan adanya tekanan dan paksaan untuk memberikan informasi yang akurat dan dibutuhkan berdasarkan pengalaman, pemikiran serta pertimbangan secara subyektif dan khususnya obyektif mengenai obyek penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam mengenai Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan *Good Governance*. Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan.

Adapun data-data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- (1) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya atau dapat dikatakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil observasi dan wawancara. Oleh sebab itu peneliti sangat membutuhkan informan, tanpa adanya informan peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Informan juga harus berbentuk *adjective*, itu dikarenakan akan mempengaruhi valid atau tidaknya data yang diteliti serta mempengaruhi keabsahan data.
- (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau sumber pertama, atau dengan kata lain hasil dari pengumpulan data oleh pihak lain, data sekunder ini dapat sekunder ini dapat diperoleh dari majalah, jurnal-jurnal ilmiah skripsi, tesis, disertasi laporan penelitian terdahulu, surat kabar, internet dan media lainnya.

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti menentukan informan bagaimana peneliti mendapatkan informan. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami pula anatomi masyarakat dimana peneliti itu dilaksanakan.

Dalam penelitian ini jumlah informan yang dibagi dalam 4 (empat) kategori yakni:

- a. Informan I adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan.
- b. Informan II adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- c. Informan III adalah tokoh masyarakat yang terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW.
- d. Informan IV adalah masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian sendiri

adalah untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2006:308) bahwa “teknik pengumpulan data itu merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Burhan (2007:115) “observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya”.

Jenis-jenis observasi menurut Marie Jahoda sebagai berikut:

a. Observasi Partisipasi

Observasi partisipasi merupakan salah satu jenis-jenis observasi, observasi partisipasi pada umumnya digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif.

b. Observasi Sistematis

Observasi sistematis merupakan salah satu dari jenis-jenis observasi. Observasi sistematis biasa disebut dengan observasi berkerangka. Sebelum mengadakan observasi terlebih dahulu dibuat kerangka mengenai berbagai faktor dan ciri-ciri yang akan diobservasi.

c. Observasi Eksperimental

Observasi eksperimental merupakan salah satu dari jenis-jenis observasi.

Observasi eksperimental memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Situasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga observasi tidak mengetahui maksud diadakannya observasi.
- 2) Dibuat variasi situasi untuk menimbulkan tingkah laku tertentu.
- 3) Observasi dihadapkan pada situasi yang seragam.
- 4) Situasi ditimbulkan atau dibuat sengaja.
- 5) Faktor-faktor yang tidak diinginkan pengaruhnya dikontrol secermat mungkin.

Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis observasi sistematis biasa disebut dengan observasi berkerangka. Sebelum mengadakan observasi terlebih dahulu dibuat kerangka mengenai berbagai faktor dan ciri-ciri yang akan diobservasi. Pengamatan yang dilakukan menggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan yakni dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian mengenai fenomena, peristiwa, atau kejadian di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dilakukannya ialah untuk mendapatkan data atau informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaiannya sejumlah pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti kepada narasumber.

Menurut Lexy J Moloeng (2007:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

Tujuh langkah penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif menurut Linclon dan Guba dalam Sugiyono (2010:235) yaitu:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Menginformasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.

- f. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Identifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian, atau pengumpulan bukti, dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

Menurut Sugiyono (2013:326) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Menurut Arikunto (2010:274), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari kebijakan peraturan, arsip kegiatan, surat tugas, papan informasi, buku laporan, data petugas dan lain-lain yakni penulis memanfaatkan sumber-sumber berupa catatan dan dokumen baik dokumen dari pemerintahan desa seperti program dan prestasi hasil pembangunan, sumber-sumber kepustakaan berupa buku teks, jurnal, dokumen lainnya. Catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan catatan dan dokumen yang dipandang perlu untuk membantu analisis.

F. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2008:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan

mengorganisasikan data, menjabarkan keadaan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat induktif sebagai suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni:

1. Tahap Pertama

Tahap awal penelitian ini adalah tahap pra lapangan dengan menyusun rencana penelitian, menetapkan lokasi penelitian, pengurusan perjanjian, penjajakan lokasi, menentukan narasumber atau informan, menyiapkan perlengkapan. Penelitian untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan obyek penelitian.

2. Tahap Kedua

Tahap analisa data dimulai dari memasuki lapangan ini meliputi latar penelitian, persiapan penelitian, memasuki lokasi dan obyek penelitian berperan serta dalam proses pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap akhir dalam penelitian. Tahap ini merupakan tahap laporan peneliti yang selain memuat temuan, penelitian juga menguraikan hasil interpretasi dan rumusan kesimpulan serta rekomendasi penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran

kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya bagi data atau informasi baru. Analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) tahap antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian, dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan
- 2) Pengkodean
Pengkodean hendaknya memperhatikan 4 (empat) hal, seperti:
 - a) Digunakan simbol atau ringkasan.
 - b) Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
 - c) Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu.
 - d) Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.
- 3) Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan objektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklarifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya faktual atau objektif deskriptif.
- 4) Membuat catatan reflektif, menuliskan apa yang terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan objektif tersebut. Harus dipisahkan antara catatan objektif dan catatan reflektif.
- 5) Membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya.
- 6) Penyimpanan data, untuk menyimpan data yang setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a) Pemberian label.
 - b) Mempunyai formasi yang *uniform* dan normalisasi tertentu.
 - c) Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.

7) Analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat.

8) Analisis antar lokasi, pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo. Masing-masing peneliti menjadi konform satu dengan yang lainnya perlu dilakukan.

9) Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi, isinya lebih bersifat matriks tentang ada atau tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

b. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevandari sistem sosial. Penyajian data diarahkan agar dapat hasil reduksi terorganisasikan, terusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedangkan data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengecek *representativeness* atau keterwakilan data.
- 2) Mengecek data dari pengaruh peneliti.
- 3) Mengecek melalui triangulasi.
- 4) Melakukan pembobotan bukti dari sumber data–data yang dapat dipercaya.
- 5) Membuat perbandingan atau mengkontrasi data
- 6) Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasikan dengan memaknai data negatif.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini diajukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur. Serta kajian futuristik dalam upaya menciptakan sistem partisipasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan apa yang selama ini diinginkan.

G. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif meliputi uji sebagai berikut :

1. Uji kredibilitas; maksudnya apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Macam–macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2008) antara lain dengan melakukan perpanjangan, pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan orang lain analisis kasus negatif, dan *membercheck*.
2. Transferabilitas; maksudnya apakah hasil penelitian ini dapat ditetapkan pada situasi yang lain.
3. Dependabilitas; maksudnya apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep–konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Konfirmabilitas; maksudnya apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih obyektif.

Selain keabsahan data di atas terdapat metode lain untuk uji keabsahan data yaitu triangulasi yang dimana pada hakekatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin masalah yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisa data. Agar data yang diperoleh lebih jelas dan memiliki kekuatan validitas dan rehabilitas, maka dengan penelitian kualitatif ini data hasil wawancara perlu dilakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut dan juga untuk memperkaya data.

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik dengan informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada. Dalam melakukan pengecekan fakta, dan informasi yang direkam dengan memanfaatkan alat bantu yang tersedia melalui triangulasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data serta triangulasi juga dapat

berguna untuk menyoediki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Triangulasi dilakukan melalui sumber lain atau sumber data yang baru, mencari informasi lain, mencari metode baru yang didukung oleh landasan teoritis.

Melalui teknik ini pemeriksaan terhadap data dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan keabsahan data. Menurut Sugiyono (2014:330) triangulasi diartikan sebagai bentuk pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber cara, dan berbagai waktu terdapat 3 (tiga) triangulasi dalam keabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh melalui beberapa informan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya penelitian mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (triangulasi). Triangulasi teknik berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan observasi sistematika, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Nilai

dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas *convergent* tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi dan metode studi dokumentasi dengan cara membandingkan informasi atau data yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan dan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel, dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan data lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Melalui teknik triangulasi data ini pemeriksaan terhadap data dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan keabsahan dan kendala.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan merupakan bentuk aktualisasi dari kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berkordinasi dalam program yang dilaksanakan, salah satunya yaitu program pembangunan infrastruktur pendidikan. Dalam pelaksanaannya harus disertai dengan dukungan penuh baik dari pemerintah, dunia usaha atau sektor swasta, maupun masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance* dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan infrastuktur pendidikan.

Untuk menjawab rumusan masalah ini, yakni tentang partisipasi masyarakat sebagai strategi mewujudkan *good governance* dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan. Peneliti mengacu pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Yadav dalam Theresia (2014:98), diantaranya:

a. Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan

Partisipasi jenis ini merupakan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk kesepakatan tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi ini penting dilakukan karena dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut menentukan arah dan pembangunan. Wujud dari partisipasi ini seperti diskusi, sumbangan pemikiran ataupun tanggapan. Dari hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa partisipasi dalam pembuatan keputusan sudah secara efektif. Dalam penyampaian informasi Pemerintah Desa mengenai pelaksanaan kegiatan, informasi yang disampaikan harus dengan jelas dan mudah dimengerti untuk ditujukan kepada masyarakat. Keberhasilan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran yang telah dicapai.

Bentuk penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terdapat beberapa tahapan yang dimulai dari salah satu aparaturnya Pemerintah Desa berkomunikasi

langsung kepada Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun sebagai perwakilan dari masyarakat untuk mengundang dan memberitahukan informasi mengenai program kegiatan yang akan dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di dalam forum. Dalam proses musrenbang tersebut disitulah perwakilan dari masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat atau aspirasi dengan berbagai permasalahan yang ada pada Desa Cipinang.

Mengenai hal pembangunan infrastruktur pendidikan yang akan dibahas di dalam musrenbang setelah mendapatkan hasil dari musrenbang kemudian tahap selanjutnya yaitu untuk Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat berdasarkan wilayahnya masing-masing. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi sumbangan ide atau buah pikiran baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang akan diproses.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi dalam hal ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Dari hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di Desa Cipinang pada masing-masing wilayah adanya kelompok swadaya masyarakat yang ikut serta dalam melakukan kegiatan yang sedang berjalan. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh kelompok swadaya secara bergotong royong dalam bentuk tenaga, ide atau gagasan yang mereka usulkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini terbukti bahwa tidak hanya masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi tetapi adapun sektor swasta seperti PT. BSM dan organisasi non profit seperti YAPPIKA yang berpartisipasi untuk

pembangunan infrastruktur pendidikan dalam bentuk materi.

c. Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Partisipasi dalam hal ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini terbukti dari masih adanya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya hal ini.

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap masukan belum mampu menerapkan dengan baik karena di dalam masyarakat Desa Cipinang masih belum sadar dan masih perlu adanya dorongan. Evaluasi terhadap proses dalam pelaksanaan pembangunan belum sesuai harapan masyarakat Desa Cipinang.

d. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan ini merupakan partisipasi dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi perkembangan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan yaitu dari sikap masyarakat yang sangat berantusias untuk menyekolahkan anak-anaknya. Adapun fasilitas sekolah dimanfaatkan untuk

hari besar agama dan hari besar Nasional walaupun pembangunan infrastruktur pendidikan belum optimal.

Dari teori faktor penghambat dan faktor pendukung menurut Adisasmita (2006:134) bahwa teori tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dimana faktor-faktor yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

Faktor Penghambat :

1) Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang dapat diartikan sebagai proses dimana kita dapat belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, bertindak. Dimana semuanya itu merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk berbagi informasi dan bertukar pikiran dengan orang lain untuk mendapatkan suatu keputusan yang terbaik, supaya dapat mengurangi kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap sebuah program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa adanya penurunan dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk tahun ini, tidak seperti tahun sebelumnya yang sangat aktif dari Pemerintah Desa untuk mensosialisasikan. Tanpa adanya sosialisasi interaksi tidak akan berjalan dengan baik, bahkan cenderung dapat melakukan hal hal yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2) Faktor Budaya

Budaya dalam pendidikan memberikan peluang terbukanya cakrawala baru dan pengetahuan yang lebih mendalam. Dilakukannya pendekatan melalui lembaga sosial baik bersifat formal maupun informal, lembaga sosial dianggap sebagai mata air yang mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu kehidupan. Tujuannya agar masyarakat sadar bahwa budaya yang berkemajuan ini tidak kalah penting untuk menjaga kontinuitas kehidupan.

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa di Desa Cipinang masih ada beberapa wilayah yang belum

tersentuh teknologi seperti speaker atau toa dan masih kental perihal keagamaan yang tidak ingin pendidikan menjadi dominan di Desa Cipinang, menurut warga tersebut mengkhawatirkan pendidikan memiliki dampak yang buruk terhadap agama dan budaya yang menyebabkan sulit untuk berkoordinasi

3) Faktor Ekonomi

Pembangunan infrastruktur memang diperlukan, akan tetapi yang harus diprioritaskan terlebih dahulu adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu masalah ekonomi dan pendidikan yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam ekonomi warga Desa Cipinang untuk pendapatan sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena masyarakat di Desa Cipinang ini lebih dominan mata pencahariannya seperti buruh dan petani untuk dasar masih mampu tetapi untuk ke jenjang atas masih sulit. Sedangkan ada sebagian warga untuk masalah pendidikan mereka masih belum mampu mengikuti perkembangannya dan untuk kepentingan pendidikan masih ada orang tua yang belum mampu. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat sendiri bisa dikatakan sudah cukup tetapi masih banyak yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari pun mereka mengandalkan hasil panen dari perkebunan mereka dahulu sehingga pendapatan mereka tergantung hasil panen.

Faktor Pendukung:

1) Tersedianya Forum Diskusi

Pemerintah Desa telah menyediakan sarana untuk menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi yang akan dibahas di dalam musrenbang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui adanya forum untuk diskusi yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat seperti Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mengenai perkembangan dan masalah yang terjadi. Setelah mendapatkan hasil dari musrenbang, kemudian perwakilan

masyarakat berdasarkan wilayah masing-masing.

2) Adanya Kesempatan

Mengenai musrenbang terdapat sebuah forum untuk membahas perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan. Dalam forum tersebut masyarakat yang diwakilkan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, ide, gagasan, ataupun aspirasinya terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yaitu setiap masing-masing sekolah juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaporkan perkembangannya kepada pihak Desa yang nanti akan dibahas dalam musrenbang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dilaksanakan dalam 4 (empat) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan sudah berjalan dengan efektif dapat dilihat dari sosialisasi langsung yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa serta tersedianya forum diskusi.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pendidikan adanya kelompok swadaya, organisasi seperti Kopel, YAPPIKA, sektor swasta seperti PT.BSM dan Bank BJB yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan.
- 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur pendidikan yaitu adanya salah satu aparatur Pemerintah Desa yang

meninjau langsung ke masing-masing sekolah juga masih ada beberapa warga yang tinggal disekitar lingkungan sekolah tetapi belum maksimal dalam berpartisipasi.

- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dilihat dari warga yang sudah memanfaatkan pembangunan yang sudah antusias dalam menyekolahkan anaknya dan juga memanfaatkan lingkungan sekolah untuk kegiatan sosial baik keagamaan maupun sosial kemasyarakatan seperti hari besar agama dan hari besar Nasional.
- b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
- Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai strategi mewujudkan good governance dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui sekolah ataupun kegiatan sosial lainnya.
 2. Pemerintah Desa harus saling berinteraksi kepada masyarakat dengan mensosialisasikan mengenai pentingnya teknologi bagi masyarakat dan anak-anak ke depannya yang pada dasarnya tidak bertentangan pada tradisi.
 3. Perlu diadakan pengembangan kegiatan dalam bidang ekonomi dalam masyarakat melalui kegiatan segala jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat dengan membentuk koperasi disetiap bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Astuti, Widi. *Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cameron, dan Quinn. *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, Reading, Massachusetts: Addison Wesley*, 1999.
- Dwipayana, Ari, AAGN. *Membangun Good Governance*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003.
- Efendi, Bachtiar. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Grigg, N. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley Sons, 1998.
- Grigg, N, Dan Wontane, D. G, *Infrastructure System Management Optimazation International Civil Engineering*, Departemen Diponegoro University, 2000.
- Idup, Suhady, dkk. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005.
- Mansour, Fakh, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2001.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- P, Siagaan Sondang. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Rukminto, Isbandi. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press, 2007.
- Stephanie, K, Marrus. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- _____. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Theresia, Aprilia dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur.
- <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id> diakses pada tanggal 2 Agustus 2018, pukul 19:15 WIB.
- Nuansa Jakarta. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor*. (Skripsi). Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2017.
- Shahnaz Natasya Yaumil Haqie, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan*, Universitas Negeri Semarang. (Skripsi), Fakultas Ilmu Pendidikan 2016.
- www.m.republika.co.id diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 15:32 WIB.
- <https://metrosindonews.com> diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 20:55 WIB.
- Laporan RPJM Desa Cipinang Tahun 2018.

